

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISTAAN

Putri Mutiara Rakista
Politeknik Bisnis Mayasari
putrimutiara514@gmail.com

Chandra Gunawan
Politeknik Bisnis Mayasari
chand.gunawan20@gmail.com

naskah masuk: Juli 2022, naskah diterbitkan: Agustus 2022

Abstrak:

Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata yang diformulasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk pembangunan nasional. Judul tersebut dilatarbelakangi karena pengelolaan obyek wisata dibawah kontrol pemerintah masih menemui beberapa kendala seperti minimnya upaya perawatan, terdapat objek wisata yang tidak terfasilitasi, kemudian banyak objek wisata dalam kondisi kotor dan belum menjamin keamanan bagi para wisatawan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk terciptanya model implemmentasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan *literature review* (tinjauan literatur). Hasil penelitian menghasilkan model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yang mengacu pada dua aspek yaitu aspek penyelenggara kebijakan dan aspek lingkungan. Sesuai dengan analisis literatur aspek - aspek tersebut dinilai yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwistaan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penyelenggaraan Kepariwistaan.

Abstract:

The implementation of tourism is the main driving element of tourism activities that are formulated in such a way as to aim for national development. The title is motivated because the management of tourism objects under government control still encounters several obstacles such as lack of maintenance efforts, there are tourist objects that are not facilitated, then many tourist objects are in dirty condition and do not guarantee safety for tourists. The purpose of this research is to create a model for implementing the implementation of tourism policies. The research method used in this study uses a literature review approach (literature review). the results of the study resulted in a model for implementing tourism implementation policies that refer to two aspects, namely aspects of policy implementation and environmental aspects. In accordance with the literal analysis, these aspects are considered to be the most influential in the successful implementation of tourism implementation policies.

Keywords: implementation, policy, implementation of touris

PENDAHULUAN

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. (Perda No. 8-2014).

Kepariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Banyak obyek wisata khususnya di Indonesia menjadi magnet tujuan turis domestik hingga luar negeri. data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) pada tahun 2020 sebanyak 518.588.962 orang. Tentunya hal ini bukan angka yang sedikit apabila dilihat dari total jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya jumlah perjalanan wisatawan mancanegara pada menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Pada bulan Januari jumlah perjalanan wisatawan mancanegara sebanyak 143.578 kunjungan, kemudian pada bulan Februari, Maret dan April yaitu sebanyak 18.455,

40.790 dan 111.057 kunjungan. Serta pada bulan Juli mengalami kenaikan yaitu sebanyak 212.332 kunjungan.

Seolah tidak ada habisnya, dari tahun ke-tahun Indonesia selalu menghadirkan obyek wisata baru yang sangat menarik untuk dikunjungi. Hal ini tentu berimbas pada pertumbuhan devisa negara sektor pariwisata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jumlah devisa sektor pariwisata (Miliar US \$), 2016-2018 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 11,206 US dan 13,139 US, kemudian untuk tahun 2018 yaitu sebanyak 16,426 US.

Namun faktanya banyak ditemukan bahwa banyak obyek wisata dibawah pengelolaan pemerintah masih menemui beberapa kendala diantaranya seperti minimnya upaya perawatan, terdapat objek wisata yang tidak terfasilitasi, kemudian banyak objek wisata dalam kondisi kotor dan belum menjamin keamanan bagi para wisatawan.

Seperti, penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kendala pada aspek anggaran dan fasilitas yang belum memadai dari pemerintah, kemudian permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan di Wilayah Pangandaran dikarenakan kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas serta kendala penyelenggaraan

kepariwisataan di Kabupaten Kayong Utara yang menyatakan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan terkait dengan pengelolaan wisata Bahari Pantai Pulau Datok oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum berjalan secara baik. (Abdussamad, 2022; Permatasari, 2018; Arifin, 2016)

Maka dari itu sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dapat memberikan gambaran dan jawaban mengenai efektifitas kebijakan kepariwisataan yang diimplementasikan.

KAJIAN LITERATUR

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penerapan kebijakan oleh administrasi pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (Simon, 2010). Secara khusus, implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Meter & Horn, 1975). Konsep implementasi ini membantu menarik perhatian pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mempelajari proses yang mempengaruhi dan menetapkan hasil dari kebijakan publik (Bempah, 2012).

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan atau

perealisasi dari suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku politik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

B. Penyelenggaraan Kepariwisataan

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Kurnia, 2019).

Hal ini juga tertuang dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “tujuan diselenggarakannya kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. (Permatasari, 2018). Sementara itu pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada (Nugraha; 2016 dan Deskarina; 2017). Sehingga penyelenggaraan kepariwisataan dengan pengelolaan pariwisata merupakan dua hal penting dan saling berkaitan satu dengan yang lain dalam dunia pariwisata.

Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata yang diformulasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk pembangunan nasional sehingga dapat terciptalah kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan literature review (tinjauan literatur). Literature review merupakan sebuah karya orisinal yang merangkum dan mensistesis penelitian sebelumnya tentang sebuah topik tertentu (Thorne dkk., 2019). Penelitian literature review berisi ulasan, rangkuman, serta pemikiran penulis dengan melakukan peninjauan berbagai dokumen baik internasional maupun nasional, seperti publikasi akademis, publikasi pemerintah, UU dan peraturan, jurnal, buku, berita media, dan bentuk catatan lain yang relevan dengan topik yang dibahas (Massaro dkk., 2016; O'Connor dkk., 2017; Yuhertiana, 2015).

Tujuan akhir dari metode tinjauan literatur yaitu agar memperoleh deskripsi detail yang berhubungan dengan sesuatu yang orang atau peneliti lain sudah kerjakan sebelumnya (Alahi & Mukhopadhyay, 2019; Suryanarayana & Mistry, 2016). Proses dalam melakukan sebuah tinjauan literatur, pada umumnya dibagi menjadi 3 tahap utama yaitu planning, conducting dan reporting (Santis dkk., 2018; Zhu dkk., 2018).

Maka dari itu, metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini didasarkan

pada langkah-langkah yang terstruktur dan tersusun:

1. Planning (perencanaan).
Dalam setiap perencanaan penelitian yang akan dibangun pasti terdapat tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai.
2. Conducting (melakukan review).
Peneliti perlu ketelitian dalam mencermati apakah relevan atau tidaknya setiap literatur yang digunakan, lalu perlu adanya ketentuan dalam melakukan seleksi sumber data, bagaimana proses dalam ekstraksi dari data yang didapat, bagaimana cara mengkaji dan melakukan sintesis sumber data agar memperoleh hasil review yang memuaskan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder, karena semua data bersumber dari internet sehingga tidak dikumpulkan secara langsung.
3. Melakukan reporting (pelaporan).
Pada tahap ini penulis menuangkan hasil review literatur yang telah dianalisis menggunakan sistematika penulisan yang akan dituliskan dalam sebuah paper jurnal ilmiah. Penulis melakukannya dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang mendalam terkait setiap informasi yang ada agar studi ini bisa memberikan manfaat secara maksimal untuk pembaca. (Prayoga: 2021).

dikenai tindakan dari pelaksanaan kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan

Bagan di atas mengacu pada hasil komparasi dari jurnal – jurnal (penelitian terdahulu), sehingga dapat diambil point – point yang relevan dalam menciptakan suatu model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yang efektif dan efisien sehingga dapat digunakan dalam penelitian – penelitian berikutnya yang serupa.

a. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan merupakan kelompok maupun lembaga yang menaungi dalam melaksanakan implementasi kebijakan yaitu disebut dengan implementor dan kelompok sasaran. Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan atau program yang ditetapkan sedangkan kelompok sasaran yaitu pihak yang dijadikan sebagai objek yang akan

Kelompok sasaran menurut Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa “target group” yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Sedangkan Winarno (2008:219) mengemukakan ada beberapa implementor atau pelaksana kebijakan publik yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementor kebijakan tersebut yaitu Birokrasi, Lembaga Legislatif, Lembaga Peradilan, Kelompok-kelompok Penekan, Organisasi Masyarakat.

Dalam model ini pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek yang penting karena setiap unsur memiliki peran dan fungsi yang berbeda beda. Pelaksana kebijakan dalam model ini diantaranya yaitu

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, Masyarakat sebagai partisipan dalam kebijakan serta peran swasta yaitu sebagai *support system* dalam pembangunan nasional. Unsur - unsur dalam aspek pelaksanaan kebijakan ini perlu memiliki kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang selaras serta harmonis, sehingga akan terciptanya implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Permatasari, 2018) bahwa peran dan fungsi ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, Ketika peran salah satu dari penyelenggara kebijakan disfungsi maka sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata akan mengalami hambatan dalam perealisasiannya.

Selanjutnya (Rahmadian, 2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya transparansi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemberlakuan kebijakan yang diperbarui akan meminimalisir konflik mengenai perbedaan kepentingan antara Pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pengusaha pariwisata. Sehingga nantinya akan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta menuju tujuan yang dikehendaki.

Pernyataan di atas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Abdussamad, 2022; Aripin 2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan tidak akan

berjalan secara optimal apabila ketiga unsur tidak dapat melakukan komunikasi, koordinasi yang selaras, karena sikap pelaksana, struktur birokrat dan dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Perlu adanya kerja sama dengan para investor atau perusahaan agar CSR (Swasta) dari perusahaan diarahkan dalam upaya pembangunan wisata dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wisata. Dengan cara ini maka seluruh elemen pelaku ekonomi akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wisata.

b. Lingkungan

Pariwisata saat ini telah dianggap sebagai salah satu industri penting dalam menghasilkan keuntungan ekonomi di sejumlah daerah sehingga banyak daerah yang terus berusaha menggali potensi daerahnya dalam sektor pariwisata.

Kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa. (UU RI No. 10-2009)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Wahab

(2014:165). Begitu juga dalam lingkungan kehidupan masyarakat, dimensi sosial – budaya, dimensi ekonomi dan dimensi politik merupakan tiga unsur penting yang dapat mempengaruhi aspek – aspek kehidupan.

Dimensi sosial-budaya merupakan cara pandang, sikap dan perilaku seseorang maupun suatu kelompok etnik yang tidak bisa terlepas dari latar belakang dan kerangka budaya masyarakat dari mana mereka berasal (Syahra, 2012). Pola – pola sosial-budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat dapat menjadi potensi apabila pendekatan kebijakan tepat sasaran dan meminimalisir kontravensi antara pemerintah dengan masyarakat maupun swasta.

Dimensi ekonomi yaitu dimensi yang mencakup aspek transaksional dalam kehidupan, meliputi pemenuhan kebutuhan sehari – hari hingga pada hal yang lebih rumit seperti pendapatan anggaran suatu daerah dan negara. Sementara itu dimensi politik yaitu dimensi yang mencakup suatu konsep pengambilan keputusan dan kekuasaan yang didalamnya memiliki kepentingan baik secara individu maupun kelompok, dimensi politik berupaya membuat manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tentunya diharapkan mampu menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan lingkungannya.

Menurut (Permatasari, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata secara umum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan dukungan lingkungan sosial, dan ekonomi dalam mengimplementasikan

kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Menurut (Soemarwoto, 2004) produk utama pariwisata adalah lingkungan itu sendiri. Dukung kawasan pariwisata merupakan kemampuan tertentu suatu kawasan untuk menerima wisatawan. (UU No. 23 -1997).

Maka dari itu dalam penyelenggaraan kepariwisataan perlu melibatkan 3 dimensi tersebut dikarenakan dapat menjadi formula yang strategis oleh pembuat maupun penyelenggara kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, karena lingkungan dapat menjadi daya tarik wisata, potensi wisata daerah, dan pelestarian adat istiadat suatu daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain bahwa masalah implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan hingga saat ini masih banyak kendala diantaranya kurangnya transparansi dan sosialisasi perubahan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan dukungan anggaran, kurangnya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan pariwisata sebagai objek dalam pariwisata serta sasaran dan target kebijakan belum jelas. Maka dari itu terciptalah suatu model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yang diharapkan mampu menjawab semua aspek yang menjadi hambatan.

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu adanya kolaborasi antara

penyelenggara kebijakan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dengan menggali dan mengakomodir potensi lingkungan daerah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Juriko. dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume IX Nomor 2, 2022.
- Arifin, Mur. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kayo Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, Vol. 5, No 2 (2016)
- Alahi, M. E. E., & Mukhopadhyay, S. C. (2019). Literature Review. In *Smart Sensors, Measurement and Instrumentation* (hal. 7–41). https://doi.org/10.1007/978-3-030-20095-4_2.
- Bempah, B.S.O. 2012. *Policy Implementation: Budgeting and Financial Management Practices of District Health Directorates in Ghana*. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok.
- Deskarina, R. (2017). Pengembangan Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta dengan Penguatan Karakter sebagai Kampung Konservasi. *Jurnal Kepariwisata*, 11(3), 39-52.
- Kurnia, Kalam Fahimi. 2019. Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019*
- Massaro, M., Dumay, J., & Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1939>
- Nugraha, B. S., & Putri, L. P. (2016). Analisis Dampak Lingkungan Dalam Kebijakan Perlindungan Situs Ratu Boko Menuju Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Kepariwisata*, 10(2), 7-14.
- O'Connor, A., Sargeant, J., & Wood, H. (2017). Systematic reviews. In *Veterinary Epidemiology: Fourth Edition* (hal. 397–420). <https://doi.org/10.1002/9781118280249.ch19>.
- Prayogya, Faiz Marwan. 2021. Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations): Vol. 05, No. 2, Mei 2021*.
- Permatasari, Desi. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh Uptd Pariwisata Wilayah Pangandaran. *Jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, hlm 64-76 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat ISSN: 2622-691X (online)*
- Rahmadian, Neshafi Laudza. 2021. Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pada Pengembangan Desa Wisata Tlahab.

- Rahmadian, Vol 4, No 1 (2021): Lontar Merah
- Santis, S., Grossi, G., & Bisogno, M. (2018). Public sector consolidated financial statements : a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 30(2), 230–251. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM02-2018-0017>.
- Suryanarayana, T. M. V., & Mistry, P. B. (2016). Review of Literature. In *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology* (hal. 27–37). <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0663-0>.
- Simon, C. A. 2010. *Public policy: Preferences and outcomes* [2 nd edt]. New York: Pearson Educations.
- Syakra, Rusyidi. 2012. Dimensi – dimensi sosial dan budaya dalam kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volumi 14 Nomor 3 Tahun 2012.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thorne, L., Andiola, L. M., Bedard, J. C., & Hux, C. T. (2019). Writing a literature review in Behavioural Accounting Research. In *The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research* (hal. 473–485). <https://doi.org/10.4324/9781315710129-30>.
- Yuhertiana, I. (2015). Behavioural Public Sector Accounting Research In Indonesia: A Literature Review. *Malaysian Accounting Review*, 14.
- Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Zhu, M., Sari, A., & Lee, M. M. (2018). A systematic review of research methods and topics of the empirical MOOC literature (2014–2016). *The Internet and Higher Education*. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2018.01.002>